

ABSTRAK

STRATEGI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, DAN TRANSMIGRASI PROVINSI LAMPUNG DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

Oleh

SAFWA SALSABILA ABBAS

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai proses implementasi strategi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam pengembangan BUMDes dan untuk mengidentifikasi apa saja faktor penghambat dari pelaksanaan implementasi strategi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam pengembangan BUMDes. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dikaji menggunakan 3 indikator implementasi strategi menurut Hunger & Wheelen (2003) yaitu program, anggaran, dan prosedur. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi strategi dalam pengembangan BUMDes oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung melaksanakan program E-Samdes dan Bimtek serta Coaching Clinic sebagai kegiatannya. Anggaran yang direalisasikan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung Tahun 2020-2024. Prosedur dalam pelaksanaan program terdapat PKS dan MoU tetapi belum terdapat dokumen prosedur yang jelas. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung dalam pengembangan BUMDes telah melaksanakan program E-Samdes beserta kegiatannya Bimtek dan Coaching Clinic. Dilihat dari anggaran dalam pelaksanaannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Transmigrasi Provinsi Lampung kurang transparansi terhadap realisasinya. Setelah itu dari prosedur pelaksanaan program dalam pelaksanaannya tidak memiliki dokumen prosedur yang disusun secara jelas. Faktor penghambat dalam penelitian ini yaitu belum adanya juknis status kodefikasi BUMDes, kurangnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan lemahnya komitmen kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung dalam penyusunan juknis dan SOP.

Kata Kunci: Strategi, Pengembangan BUMDes

ABSTRACT**STRATEGY OF DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, DAN
TRANSMIGRASI OF LAMPUNG PROVINCE IN THE DEVELOPMENT OF
VILLAGE OWNED ENTERPRISES (BUMDes)**

By

SAFWA SALSABILA ABBAS

Village-Owned Enterprises (BUMDes) are Village business institutions managed by the community and the Village government in an effort to strengthen the Village economy. This study aims to analyze the strategy implementation process by the Lampung Province Community, Village and Transmigration Empowerment Service in developing BUMDes and to identify what are the inhibiting factors from implementing strategy implementation by the Lampung Province Community, Village and Transmigration Empowerment Service in developing BUMDes. This research is a qualitative descriptive study that was studied using 3 indicators of strategy implementation according to Hunger & Wheelen (2003), namely programs, budgets, and procedures. The results of this study indicate the implementation of strategies in developing BUMDes by the Lampung Province Community Empowerment, Village and Transmigration Office implementing the E-Samdes and Bimtek programs as well as Coaching Clinic as activities. The realized budget is in accordance with the Strategic Plan of the Lampung Province Community Empowerment, Village and Transmigration Office for 2020-2024. The procedure in implementing the program includes PKS and MoU but there is no clear procedure document. The conclusion of this research is that the strategy of the Lampung Province Community Empowerment, Village and Transmigration Office in developing BUMDes has implemented the E-Samdes program along with its activities of Bimtek and Coaching Clinic. Judging from the budget in its implementation, the Lampung Province Community Empowerment, Village and Transmigration Office lacks transparency in its realization. After that, the procedure for implementing the program in its implementation did not have a clearly defined procedure document. The inhibiting factors in this study are the absence of technical guidelines for the status of BUMDes codification, the lack of human resource competence (HR) and the weak commitment of the head of the Lampung Province PMDT Office in the preparation of technical guidelines and SOP.

Keywords: Strategy, BUMDes Development